

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI REGULER
DALAM PENYELENGGARAAN MANASIK DI KOTA CILEGON

INTISARI

Oleh

Shinta Danisa Ristita¹

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban Kelompok Bimbingan Ibadah Haji terhadap wanprestasi pelaksanaan penyelenggaraan Manasik di Kota Cilegon, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan jamaah haji terhadap wanprestasi pelaksanaan penyelenggaraan Manasik di Kota Cilegon.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hokum ini adalah metode yuridis empiris atau *sociological jurisprudence*. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti suatu kenyataan hukum di masyarakat yaitu permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak KBIH dengan jamaah digolongkan sebagai perjanjian lisan. Ditemukan 2 (dua) permasalahan yang timbul dalam perjanjian ini, yaitu terkait pertanggungjawaban KBIH dan upaya yang dilakukan oleh jamaah. Upaya yang dilakukan oleh jamaah yaitu, pertama, dengan melakukan *small claim*. Kedua, dengan penyelesaian sengketa konsumen secara diluar pengadilan atau melalui proses litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Haji, KBIH.

¹ Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

LEGAL PROTECTION OF REGULAR PROSPECTIVE HAJJ PILGRIMS IN ORGANIZING *MANASIK* OF HAJJ IN CILEGON

ABSTRACT

By

SHINTA DANISA RISTITA²

The objective of this research is to study about the responsibility of the *KBIH* (*Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*) of the torts in organizing *Manasik* of Hajj in Cilegon. This research is also held to find out the legal action done by Hajj Pilgrims about those torts.

The methodology that is used in the research is empiric juridical or sociological jurisprudence. It means the research is held by researching the legal fact or case in society. The object of the research is the real case happened in the society. After the present writer gets all the cases, then it is related to the legal regulations and constitutions.

The finding of the research shows that the agreement between *KBIH* and Hajj Pilgrims is classified as verbal agreement. The present writer finds two problems that come up because of this agreement which are the responsibility of the *KBIH* and the action of the Hajj Pilgrims in response to the problems. The first action of the hajj pilgrims related to the problem is doing the small claim and the second one is doing the settlement outside the court or through litigation.

Keywords: Consumer Protection, Hajj, *KBIH*

² Undergraduate Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.